

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN NOYAN KABUPATEN SANGGAU

Abang Suriyanto

Bappeda Kabupaten Sanggau, Jl. Jend. Sudirman No.09 Sanggau,

Telp: (0564) 21174

Evaluation of the National Community Empowerment Program Implementation (PNPM) through Sub-district Development Program (PPK) at Noyan Sub-district, Sanggau District, West Borneo

This research aims at analyzing the implementation of the National Community Empowerment Program Implementation (PNPM) through Sub-district Development Program (PPK) at Noyan Sub-district, Sanggau District, West Borneo. The analysis covers the inputs and outputs of the program. The inputs consist of socialization, inter-village consensus, trainings, social and economic infrastructure development, saving and loan groups, and the sustainability of the program. The outputs include decreasing poverty, the expansion of income generating activity, people participation in income generating activity, the improvement of group awareness, and the improvement of community capacity. The results of interviews, observation, and literature study show that the implementation of the National Community Empowerment Program Implementation (PNPM) through Sub-district Development Program (PPK) at Noyan Sub-district, Sanggau District, West Borneo is yet to be optimized.

Keywords: community, empowerment, community empowerment programme, socialization, programme optimalization

A. LATAR BELAKANG

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan salah satu kebijakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan pada masa lalu di mana pembangunan, khususnya di pedesaan, lebih banyak dilaksanakan melalui program-program seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan P3DT, dimana program-program tersebut memiliki sifat lebih sentralistik serta diterapkan secara seragam (*uniform*) kepada desa-desa di seluruh Indonesia, dengan mengesampingkan nilai-nilai budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat desa/kelurahan .

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka PNPM-PPK dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. PNPM- PPK merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan. Pengembangan konsep PNPM-PPK ini juga diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Seluruh proses kegiatan PNPM-PPK pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu: pertama, memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk

menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggungjawab. Kedua, menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Perubahan pola pembangunan ini diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan inovasi cemerlang melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan tersebut, akan menimbulkan konsekuensi logis bagi pemerintah daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan/program pembangunan yang mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memperhatikan karakteristik potensi sosial ekonomi lokal.

Secara umum PNPM-PPK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya PNPM-PPK sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai (*open menu*), terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Lingkup kegiatan PNPM-PPK pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Namun masyarakat diberikan kebebasan untuk mengajukan usulan apapun yang sesuai dengan kebutuhannya. Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM-PPK dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan meliputi: (1) Kegiatan Pendidikan Masyarakat; (2) Kegiatan Kesehatan Masyarakat; (3) Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan; dan (4) Kegiatan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dan hasil pengamatan sementara penulis di lapangan, dengan menyempitkan batasan cakupan wilayah penelitian pada Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Kecamatan Noyan merupakan salah satu dari empat kecamatan yang ditetapkan sebagai alokasi kegiatan PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) belum sepenuhnya menunjukkan gambaran keberhasilan upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

Adapun sejumlah gejala yang menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan PNPM-PPK adalah: pertama, masih banyak penduduk di Kecamatan Noyan yang hidupnya miskin, sehingga program kegiatan yang telah dilaksanakan seolah tidak memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kedua, masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kehadiran mereka pada saat diadakan kegiatan sosialisasi dan musyawarah antar desa. Ketiga, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya SDM, dapat dilihat dari lama mengenyam pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari salah satu komponen IPM yaitu rata-rata lamanya mengenyam pendidikan (sekolah). Keempat, pemberian dana bantuan yang tidak merata pada tiap desa, sehingga tidak semua Desa mendapatkan bantuan dengan jumlah yang sama sehingga berakibat pada ditundanya beberapa kegiatan yang diusulkan. Kelima, dana bantuan banyak digunakan bagi peningkatan sarana-sarana fisik di perdesaan seperti jalan dan sarana air bersih. Sehingga tidak menyentuh langsung pada masyarakat miskin. Berdasarkan data yang ada, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dari Rp500.000.000,00 dana bantuan yang dialokasikan lebih banyak di gunakan

untuk kegiatan pembangunan jalan dan sarana air bersih. Sedangkan kegiatan yang langsung dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan pemberian bantuan berupa dana bergulir yang diperuntukkan bagi kelompok ibu-ibu di desa sebagai modal usaha dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun dalam tiga tahun terakhir hanya mendapatkan Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 saja.

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, disampaikan beberapa landasan teoritis/konsep yang berkaitan topik kajian. Adapun beberapa hal tersebut adalah administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan konsep PNPM-PPK.

1. Administrasi Pembangunan

Siagian (2000: 5) memaknai administrasi pembangunan sebagai berikut: "Administrasi pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam suatu segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya".

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (1986: 23): "Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembagunan suatu sistem administrasi negara dilakukan, sehingga dengan demikian sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif".

Dalam kaitannya dengan administrasi pembangunan, Tjokroamidjojo (1991: 8) mengemukakan: "Ciri-ciri administrasi pembangunan, yaitu yang utama adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan". Pendapat ini mengedepankan administrasi pembangunan sebagai suatu proses kerja sama yang dimaksudkan untuk menciptakan perubahan dalam suatu lingkungan secara rasional yang terarah pada perubahan yang lebih baik.

Pengertian dan ciri administrasi pembangunan ini berdampak pada fungsi administratif dalam administrasi pembangunan, sebagaimana dikemukakan Tjokroamidjojo (1991: 8): "Yaitu hanya sesuai dengan dasar-dasar hukum kewenangan fungsinya serta hasil perpaduan pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat". Pendapat ini mengarahkan administratif dalam administrasi pembangunan memiliki kewenangan legal formal yang sekaligus bertindak sebagai pembaharu dalam proses perubahan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam paradigma baru dalam administrasi pembangunan dikemukakan Kartasasmita (1996: 170) adalah sebagai berikut: (1) Birokrasi harus membangun partisipasi masyarakat; (2) Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan yang kurang berdaya; (3) Peran aparatur negara harus sudah bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan (*empowering*); dan (4) mengembangkan keterbukaan (*transparency*) dan bertanggungjawab (*accountability*).

Berdasarkan pendapat tersebut, secara singkat dapat dijelaskan bahwa paradigma baru dalam administrasi pembangunan menuntut peran aparatur atau birokrasi dalam membangun dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, berorientasi kepada kepentingan seluruh masyarakat, mengarahkan dan memberdayakan serta mengembangkan keterbukaan dan rasa tanggung jawab. Jadi administrasi pembangunan

pada hakikatnya adalah administrasi negara yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan di berbagai bidang kehidupan bangsa dari negara yang bersangkutan.

2. Program PNPM-PPK sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan salah satu kebijakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya akan penulis jelaskan tujuan dilaksanakan program PNPM-PPK. Program ini lebih memfokuskan pada pemberdayaan manusia menjadi prioritas utamanya, karena dengan semakin berdayanya manusia pada gilirannya akan meningkatkan daya masyarakat secara keseluruhan.

Adapun tujuan umum PNPM-PPK menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (2007: 1) adalah "Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi". Sedangkan tujuan khusus PNPM-PPK yaitu: (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan; (4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; (6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD); dan (7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Dalam pelaksanaannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan saat ini harus dipandang sebagai rangkaian pelaksanaan pembangunan jangka pendek guna meletakkan landasan yang mantap berkelanjutan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang ke arah perubahan struktur sosial Ekonomi yang benar. Pelaksanaan PNPM-PPK perlu terus dimonitor dan dievaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan perumusan program selanjutnya. Era reformasi merupakan kesempatan untuk meningkatkan segenap langkah yang sudah dilakukan dan terus menyempurnakannya menuju pembangunan partisipatif yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam mekanisme pengendalian PNPM-PPK, perencanaan yang disusun di daerah perlu didasarkan pada semua potensi dan kendala yang ada di daerah tersebut. Perencanaan yang aspiratif diawali dari musyawarah Antar Desa (MAD) kemudian dibawa ke musyawarah tingkat Kecamatan atau Musrenbang Kecamatan, Musyawarah Kabupaten (Musrenbang Kabupaten), Musrenbang Propinsi dan pada akhirnya akan dibahas dalam musyawarah tingkat Nasional.

Menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (2007 : 29) tahap-tahap dalam pengendalian PNPM-PPK adalah penyiapan masyarakat, pengendalian kegiatan, dan pelestarian kegiatan. Kegiatan penyiapan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dilakukan oleh masyarakat. Pilihan kegiatan didasarkan pada kebutuhan, dimusyawarahkan dalam

lembaga musyawarah pembangunan baik di desa maupun di Kecamatan. Adapun pelestarian kegiatan didasarkan pada prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan Program Pengembangan Kecamatan.

Salah satu aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah dana. Menurut Dirjen PMD (2007 : 4), sumber dana dalam pelaksanaan PNPM-PPK berasal dari: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari rupiah murni maupun dari pinjam/hibah; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah; (3) APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total BLM di kabupaten/kota; (4) Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*); dan (5) Swadaya masyarakat (Asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).

Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM-PPK tersebut di atas di gunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu: (a) Pengembangan Masyarakat; (b) Bantuan langsung masyarakat (BLM); (c) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku lokal ; dan (d) Bantuan pengelolaan dan Pengembangan Program.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri, pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi maupun individu agar menjadi lebih baik atau berdaya, dan sering disebut sebagai kecenderungan mendasar dari makna pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Webster dalam oxford English Dictionary (Priyono dan Pranaka, 1996: 3) yang menjelaskan bahwa:

Kata *empower* mengandung 2 (dua) arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama pemberdayaan diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau delegasi otoritas kepada pihak lain. Dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Sedangkan menurut Stewart (Hardjana, 1998: 2) yang dimaksud pemberdayaan adalah seperti berikut: "*Empowerment seeks to eliminate all the unnecessary rules, procedures, standing orders, etc. which actually stand between the organization and its goals. The aims is to remove as many restrictions as possible in order to unblock the organisation and the people who work in it, liberating them from unnecessary limitations which slow their responses and constrain their action*".

Lebih lanjut Oakley dan Mersen (Priyono dan Pranaka, 1996: 57) menyebutkan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini berupaya membangun kemandirian melalui organisasi. Sedangkan kecenderungan sekunder berarti proses pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Dalam hal ini Kartasmita (1996: 28) menyatakan bahwa prinsip-prinsip

tersebut adalah terarah, mengikutsertakan masyarakat, adanya pendekatan kelompok, dan pendampingan

Terarah secara populer disebut keberpihakan. Hal tersebut berarti hanya ditujukan kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan sendiri.

Mengikutsertakan masyarakat penting untuk dilakukan mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian kepercayaan kepada masyarakat. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat salah satu kunci dalam pemberdayaan.

Pendekatan kelompok perlu dilakukan mengingat pada kenyataannya secara individu anggota-anggota masyarakat akan sulit memecahkan masalahnya sendiri. Dalam hal ini pengorganisasian masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya memberdayakan masyarakat karena setiap tindakan-tindakan yang akan dilakukan akan berjalan secara efektif, selain itu dilihat dari penggunaan sumber daya juga akan lebih efisien.

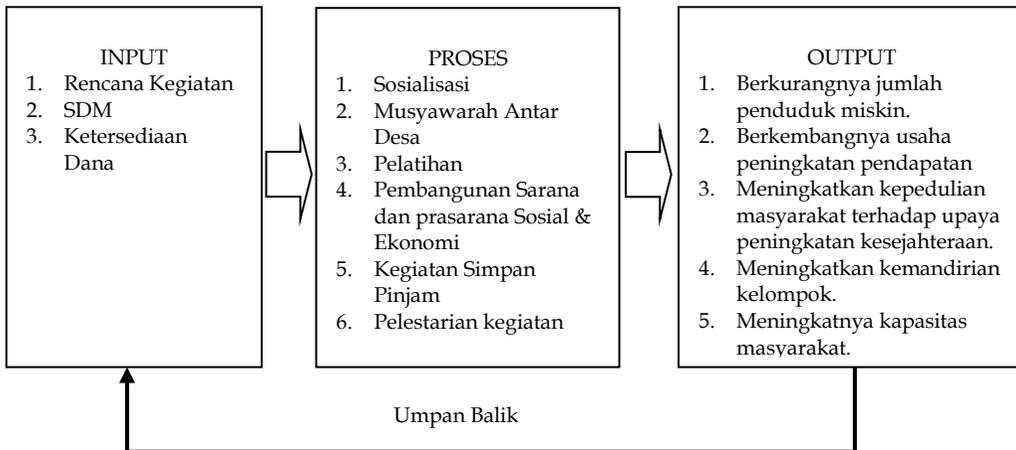
Pendampingan berfungsi sebagai penyerta proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat. Pendamping dapat berperan sebagai fasilitator, komunikator, ataupun administrator, serta membantu mencari cara pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas, pada prinsipnya pemberdayaan merupakan penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Selain prinsip, perlu pula difikirkan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang merupakan langkah-langkah dalam proses pemberdayaan yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yang berpedoman pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Sumodiningrat (1999: 129) terdapat tiga strategi dasar pemberdayaan. Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta dari masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Lebih lanjut Sumodiningrat (1999: 138) mengemukakan lima indikator keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Keempat, meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat. Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Berdasarkan beberapa teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun model berfikir yang dapat dilihat pada gambar Model Berfikir.



Gambar Model Berfikir

C. METODE

Penelitian ini menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari faktor yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan PNPM-PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan teknik ini, informan yang terpilih adalah: (1) Camat Noyan; (2) Kasi PMD Kecamatan Noyan; (3) Fasilitator Kecamatan; (4) Kepala Desa di Kecamatan Noyan; (5) Ketua Unit Pengelola Kegiatan; dan (6) Tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara disini adalah data yang bersifat kualitatif. Instrumen pengumpul data yang digunakan berbentuk pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data yang lengkap penulis akan menerapkan teknik wawancara *probing* (Singarimbun, 1998: 193), pendekatan ini adalah teknik komunikasi untuk menggali informasi lebih dalam dari responden. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dimana penulis turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan melalui dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan proses sebagai berikut: (a) menulis data, yaitu meringkas/menulis kejadian dan situasi yang dijumpai di lapangan yang terkait dengan objek penelitian, termasuk meringkas kontak langsung dengan orang; (b) mengedit data, yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul meliputi kelengkapan dan kebenaran, sehingga mempermudah dalam proses selanjutnya; (c) mengklasifikasi data, yaitu data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan sumber dan alokasinya masing-masing; dan (d) menyajikan data, yaitu data yang telah diformulasikan dideskripsikan dan diberi penjelasan, serta diuraikan secara mendalam dan sistematis berdasarkan pemikiran logis, kemudian menarik kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pembahasan terhadap evaluasi PNPM-PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau dilakukan melalui beberapa indikator yang disajikan berikut ini.

1. Input PNPM-PPK

a. Rencana Kegiatan

Dari hasil wawancara penulis dengan camat Noyan, bahwa penyusunan rencana kegiatan PNPM PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau dibahas dalam Musyawarah Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan, dan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kabupaten. Dalam tiap tingkatan musyawarah masyarakat selalu dilibatkan. Hal ini dimaksudkan agar rencana kegiatan yang akan dihasilkan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat. Pada kegiatan musyawarah ini disusun skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana atau anggaran yang tersedia.

Dengan melibatkan masyarakat dalam tahapan penyusunan rencana kegiatan, berarti telah sesuai dengan tujuan dari program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan. Dimana program ini meningkatkan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan pula masyarakat mampu untuk memobilisasi, mengakses dan mengelola sumberdaya yang mereka miliki.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Camat Noyan, Kasi Ekbang Kecamatan Noyan menyatakan sebagai berikut: *“Masyarakat kita libatkan dalam penyusunan rencana kegiatan terutama pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan karena sesuai surat Dirjen PMD Nomor 414.2/979/PMD tanggal 30 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM-PPK Tahun 2007. Dalam melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian harus melibatkan masyarakat. Dengan demikian ada tanggung jawab secara moral dari masyarakat untuk menyukseskan program yang akan masuk ke daerah mereka. Dalam menyusun atau merancang rencana program kegiatan PNPM-PPK ini tidak semata dengan menerapkan metode Bottom Up Planning tetapi juga dipadukan dengan Top down planning. Sehingga adanya sinkronisasi antara program dari pusat dan keinginan masyarakat. Dan menghasilkan rencana kegiatan yang lebih efektif akan dapat direalisasikan“.*

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, penulis juga mengadakan wawancara dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Noyan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam menyusun rencana program atau kegiatan, tokoh masyarakat serta perangkat desa dilibatkan dalam penyusunannya.

Demikian juga pada penyusunan rencana kegiatan PNPM-PPK yang akan dilaksanakan dibahas dalam musyawarah antar desa dan disusun skala prioritasnya. Tetapi dalam proses penyusunan rencana kegiatan tidak selamanya mulus. Sudah barang tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi pada saat menyusun rencana kegiatan yaitu keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama pengetahuan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan. Kenyataan ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Noyan yang masih rendah.

Pada umumnya, tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Noyan adalah sekolah dasar. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini berimbas pada produk rencana yang dihasilkan. Namun dalam penyusunan rencana kegiatan ini masyarakat juga dibantu oleh satu orang Fasilitator Kecamatan. Sedangkan aparat kecamatan tidak boleh terlibat secara langsung dalam penyusunan rencananya. Aparat kecamatan terbatas pada memberi

arahan dan bimbingan saja. Karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bahwa Program PNPM-PPK yaitu memberdayakan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan apa yang sangat dibutuhkan oleh mereka.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi. Demikian pula dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) sudah tentu memerlukan sumber daya manusia baik dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, serta pelestarian program.

Dalam PNPM-PPK, masyarakat adalah pelaku utama. Namun masih ada pelaku-pelaku lainnya seperti di desa, kecamatan, dan kabupaten hingga ke pusat. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi berbeda sesuai dengan tingkatannya. Adapun pelaku PNPM-PPK untuk tingkat kecamatan adalah Camat sebagai pembina tingkat kecamatan, PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yaitu Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Fasilitator Kecamatan yaitu pendamping masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-PPK. Sedangkan Pelaku di desa yaitu Kepala Desa sebagai Pembina di desa, Pengelola kegiatan yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Khusus untuk pengelola kegiatan dipilih oleh masyarakat pada saat musyawarah antar desa, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Camat Noyan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Noyan didapat informasi sebagai berikut: *“Secara kuantitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Noyan cukup memadai untuk dijadikan agen pembangunan. Dari 9.663 orang penduduk, 5.689 orang merupakan angkatan kerja yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam program pembangunan. Tetapi dari segi kualitas memang dirasakan kurang memadai. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Kecamatan Noyan tidak tamat Sekolah Dasar”*.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, penulis melakukan penelaahan terhadap buku dan doumen yang ada relevansinya dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan Buku Kecamatan Noyan Dalam Angka tahun 2008. Dari hasil telaahan diperoleh informasi bahwa dari segi kualitas sumber daya manusia kurang memadai.

Dari data yang ada, tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Noyan sebagian besar (35,21 %) adalah tamatan sekolah dasar. Dengan tingkat pendidikan yang demikian dapat dikatakan kualitas sumber daya manusianya kurang. Karena salah satu indikator untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Mengingat bahwa PNPM-PPK ini yang melaksanakannya adalah masyarakat. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatannya. Maka untuk mengelola kegiatan PNPM-PPK ini tentunya dibutuhkan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan minimal tamatan sekolah lanjutan atas. Karena sumber daya manusia yang dimiliki terbatas sehingga menyebabkan sulit untuk memilih mereka yang ditugaskan menjadi pengelola kegiatan.

c. Ketersediaan Dana

Dana merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan. Tanpa dukungan dana, sebaik apapun suatu rencana program tidak akan dapat direalisasikan. Begitu pentingnya ketersediaan dana dalam merealisasikan rencana program. Dana dalam alam PNPM-PPK bersumber dari APBN, APBD, dan Swadaya masyarakat.

Dari hasil wawancara dan telaahan dokumen yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa besarnya dana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan PNPM-PPK,

khususnya untuk dana yang bersumber dari APBN tiga tahun terakhir yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp. 500.000.000 setiap tahunnya. Sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 besarnya dana yaitu Rp. 200.000.000, tahun 2007 sebesar Rp. 280.247.500, dan tahun 2008 sebesar Rp. 400.000.000. Namun dana yang bersumber dari masyarakat hanya berupa material dan tenaga saja yang dianalogikan sebagai dana masyarakat. Material dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat tadi merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PNPM-PPK tersebut. Dan dengan demikian masyarakat merasa ikut memiliki dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Adapun dana tersebut digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang telah ditetapkan atau disepakati pada musyawarah antar desa dan merupakan prioritas utama. Karena keterbatasan dana yang tersedia, ada beberapa usulan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan di tunda untuk tahun berikutnya.

Kegiatan yang dibiayai oleh PNPM-PPK dan yang telah disepakati dalam musyawarah antar desa lebih banyak dipokuskan pada kegiatan fisik. Sedangkan untuk kegiatan non fisik seperti usaha perekonomian hanya sebagian kecil saja.

Dalam penyusunan rencana penggunaan biaya lebih didominasi atau difokuskan pada kegiatan fisik seperti rehab jalan dan sarana air bersih. Sedangkan yang langsung menyentuh pada sektor ekonomi terutama rumah tangga miskin mendapat porsi yang sangat kecil. Untuk tiga tahun pertama PNPM-PPK masih memprioritaskan pada sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kegiatan PNPM-PPK di kecamatan Noyan yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000 dirasakan kurang bila dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang harus dibiayai. Sehingga dalam penyusunan rencana kegiatan harus memperhatikan ketersediaan dana atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Namun dana yang bersumber dari APBN ini, sudah sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan oleh Dirjen PMD Depdagri. Dimana besarnya dana yang diberikan atau dialokasikan kepada daerah dengan melihat jumlah penduduknya.

Sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau digunakan untuk mendanai kegiatan operasional serta untuk honorarium Tim Koordinasi dan pengelola kegiatan. Dan pembangian dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau tidak jelas besarnya untuk masing-masing kecamatan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Noyan merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapatkan alokasi PNPM-PPK.

2. Proses PNPM-PPK

Proses pelaksanaan PNPM-PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, musyawarah antar desa, pelatihan, pembangunan sarana sosial dan ekonomi, kelompok simpan pinjam, pelestarian kegiatan.

Sosialisasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PNPM-PPK kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada pelaku dan instansi atau lembaga pendukung PNPM-PPK di semua tingkatan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan, dan tahapan-tahapan dalam PNPM-PPK. Oleh karena itu sosialisasi tidak hanya dilakukan pada saat awal pelaksanaan program saja tetapi secara terus menerus sampai akhir pelaksanaan program. Pada dasarnya proses sosialisasi

PNPM-PPK dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi melalui pertemuan langsung dan sosialisasi melalui media informasi.

Sosialisasi PNPM-PPK melalui pertemuan langsung dilakukan dengan menggunakan pertemuan-pertemuan formal yang sengaja dilakukan dalam rangka pelaksanaan PNPM-PPK maupun informal menggunakan pertemuan-pertemuan yang telah ada sebelumnya. Pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi di kecamatan dan desa dalam rangka memperkenalkan PNPM-PPK adalah pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD). Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan yang difasilitasi oleh konsultan Kabupaten dan Tim Koordinasi Kabupaten.

Pada kegiatan Sosialisasi inilah PNPM-PPK diperkenalkan kepada masyarakat sebagai penerima dan pelaksana dari program. Adapun hal-hal yang diinformasikan dalam sosialisasi yaitu tujuan, perinsip, kebijakan, prosedur, siapa dan bagaimana melaksanakannya, maupun apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkenaan dengan PNPM-PPK.

Adapun sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik media informasi tradisional maupun yang telah modern. Beberapa media informasi yang dapat digunakan antara lain: (1) tokoh-tokoh masyarakat (agama, adat) yang ada dilokasi program; (2) Media Cetak dan Elektronika; dan (3) Papan Informasi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Noyan didapat gambaran bahwa mereka juga ikut terlibat dan hadir pada kegiatan sosialisasi tentang PNPM-PPK yang dilaksanakan di Kecamatan Noyan. Selain itu mereka juga mendapatkan informasi melalui brosur, selebaran, bulletin, spanduk tentang PNPM-PPK yang sengaja di bagikan pada masing-masing peserta. Informasi tentang PNPM-PPK dapat pula di diperoleh dari koran Pontianak Pos serta melalui siaran di radio Daranante.

Musyawarah antar desa adalah suatu forum tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa-desa yang terdapat dalam wilayah kecamatan untuk mendapatkan penjelasan tentang PNPM-PPK dan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam menentukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada pertemuan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan dengan mekanisme berjenjang dan partisipatif.

Musyawarah antar desa dilaksanakan di ibukota Kecamatan Noyan bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Noyan. Musyawarah antar desa diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan, Fasilitator Kecamatan dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Kabupaten.

Adapun yang menjadi peserta dalam musyawarah antar desa seperti Camat atau staf terkait, Kepala Desa di lingkungan kecamatan, BPD atau sebutan lainnya, Wakil RTM dari setiap desa, Lembaga Swadaya masyarakat/organisasi massa (Ormas), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Dengan demikian semua unsur yang ada di masyarakat diharapkan mau berpartisipasi demi terlaksananya program tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan dengan mengadakan wawancara kepada Camat Noyan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Noyan, Fasilitator Kecamatan diperoleh informasi bahwa dalam musyawarah antar desa, mereka mengundang para kepala desa, tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa, Ormas/Karang Teruna, Ibu PKK. Dari 42 orang yang diundang untuk mengikuti kegiatan musyawarah antar desa, namun yang hadir sebanyak 30 orang (71,43%).

Lebih lanjut Kasi Ekonomi dan Pembangunan mengatakan: *"Dalam musyawarah antar desa tersebut dipilih dan ditetapkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), disusun urutan peringkat atau prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan baik kegiatan fisik maupun non fisik"*.

Pelatihan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan PNPM-PPK. Pada setiap tahapan pelaksanaan PNPM-PPK akan terjadi proses transfer pengetahuan dan keterampilan antar pelaku program, pelaku program dengan masyarakat dan antar masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran. Pendekatan pelatihan dalam PNPM-PPK menggunakan pola pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode yang partisipatif. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaku PNPM-PPK yang terdiri dari Pelatihan Pra Tugas dan Pelatihan Lanjutan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Fasilitator Kecamatan serta berdasarkan hasil telaahan dokumen yaitu berupa laporan bulanan Tim Koordinasi Kecamatan. Diperoleh informasi bahwa pelatihan lanjutan dilaksanakan oleh Fasilitator Kecamatan dibantu Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknik Kabupaten. Pelatihan dilaksanakan di gedung serba guna kecamatan. Dengan dilaksanakan pelatihan ini diharapkan masing-masing pelaku PNPM-PPK memahami dan memiliki persepsi yang sama tentang PNPM-PPK, mengetahui tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, mampu merencanakan kegiatan, mampu melakukan proses pencairan dana dan memahami sapek pelestarian kegiatan PNPM-PPK.

Setelah diadakan pelatihan terhadap pelaku PNPM-PPK, tahap selanjutnya adalah mengimplentasikan apa yang menjadi kesepakatan bersama pada saat musyawarah antar desa yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Terutama sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat pedesaan. Seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, bantuan permodalan (Dana Simpan Pinjam).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penanggung jawab kegiatan bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi dilakukan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir ini sarana yang dibangun lebih dipokuskan pada jalan. Baik itu pembukaan jalan, perbaikan jalan, dan peningkatan jalan yang sudah ada berupa rabat beton serta pembangunan sarana air bersih. Dipilihnya kedua sarana dan prasarana ini dikarenakan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan adanya jalan diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang dibangun dan diperbaiki merupakan jalan penghubung antar dusun dan desa, antar desa dengan desa, serta antar desa dengan kecamatan. Dengan adanya jalan akan membuka akses baik lintas barang dan orang. Terbukanya akses memberi peluang bagi masyarakat yang ada di kecamatan Noyan untuk memasarkan atau menjual hasil pertaniannya ke daerah lain. Secara otomatis akan meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan mereka.

Sedangkan pembangunan sarana air bersih dimaksudkan karena setiap musim kemarau penduduk di wilayah kecamatan Noyan mengalami krisis air bersih. Karena pada musim kemarau sungai sebagai sumber utama air bersih mengalami kekeringan. Oleh karena itu dengan dibangunnya sarana air bersih diharapkan dapat mengatasi kesulitan air bersih pada saat musim kemarau. Masyarakat tidak lagi perlu lagi pergi ke sungai untuk memperoleh air bersih. Karena air sudah datang ke rumah mereka. Baik sambungan langsung ke rumah-rumah maupun pada bak penampungan yang dibangun di beberapa tempat di desa mereka.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sarana sosial dan ekonomi Kepala Desa Noyan mengatakan sebagai berikut: *"Pelaksanaan Pembangunan Sarana sosial dan ekonomi (jalan dan air bersih) dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat bekerja dan diberi upah. Tapi upahnya tidak besar bila dibandingkan dengan mereka bekerja di proyek lain.*

Ini dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat dalam PNPM-PPK yaitu berupa tenaga". Sedangkan menurut Kepala Desa Semongan: "Pelaksanaan pembukaan jalan dilakukan dengan menyewa alat berat ditambah dengan mempekerjakan masyarakat. Masyarakat bekerja dan di upah. Namun upahnya tidak besar bila dibandingkan dengan mereka bekerja di tempat lain. Inilah bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM-PPK yaitu berupa tenaga".

Selain pembangunan sarana sosial dan ekonomi, pelaksanaan PNPM-PPK yaitu berupa pemberian dana bantuan tunai kepada masyarakat. Pemberian dana bantuan tidak cuma-cuma, akan tetapi harus memenuhi ketentuan yang disepakati oleh masyarakat di dalam musyawarah antar desa. Pemberian Dana pinjaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana pinjaman digunakan oleh Kelompok untuk modal usaha.

Sedangkan mekanisme dan tata cara penyaluran dana simpan pinjaman serta sanksi ditentukan oleh masyarakat pada saat musyawarah antar desa. Pemberian dana simpan pinjam ini dapat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang tidak punya modal tapi ada keinginan untuk berusaha. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai masyarakat, hampir semua informan mengatakan sebagai berikut: "Pemberian atau penyaluran bantuan (pinjaman) tidak merata. Hanya orang/ kelompok tertentu saja yang mendapatkannya. Seperti kerabat pengurus pengelola kegiatan. Dana tidak bergulir kepada kelompok lain".

Sebagai bahan perbandingan penulis juga mengadakan wawancara dengan pengelola kegiatan, dimana yang bersangkutan mengatakan sebagai berikut: "Pemberian atau penyaluran bantuan (pinjaman) sudah sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama, mengingat alokasi dana yang tersedia terbatas jadi tidak mungkin semua yang mengajukan pinjaman dipenuhi. Tentunya bergilir setelah ada pengembalian dari kelompok peminjam. Selain dana terbatas, yang menyebabkan lambatnya perguliran karena ada kelompok yang menunggak pengembalian pinjamannya. Dengan demikian dapat menghambat atau menghalangi yang lain untuk meminjam".

Sementara itu, Kasi Ekonomi Pembangunan mengatakan sebagai berikut: "Sebenarnya pemberian atau penyaluran bantuan (pinjaman) sudah sesuai ketentuan, tetapi karena dana yang disalurkan terbatas, sedangkan peminat banyak. Jadi tentu ada yang dapat duluan dan ada yang belum. Namun masih ada kemungkinan dapat karena dana ini sifatnya bergilir setelah ada pengembalian dari kelompok peminjam".

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan PNPM-PPK khususnya dana bantuan masyarakat melalui simpan pinjam tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya dana dapat bergulir kepada kelompok lain. Tetapi karena ada kelompok yang tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu, maka terdapat kelompok lain yang tidak mendapatkan dana pinjaman.

Pengelolaan kegiatan PNPM-PPK harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM-PPK harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM-PPK harus mengetahui dan memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-PPK secara benar.

Hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik, apabila telah selesai dikerjakan atau dibangun diserahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkannya. Dan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai Fasilitator Kecamatan, yang bersangkutan mengatakan: “*Semua aset yang telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkannya. Akan tetapi apabila aset yang diserahkan tadi tidak dikelola dengan baik, seperti tidak terpelihara atau tidak bermanfaat, dan jika pengembalian pinjaman tidak lancar atau macet, maka desa tersebut tidak akan mendapatkan dana bantuan PNPM-PPK lagi pada tahun berikutnya*”.

Selain mewawancarai Fasilitator Kecamatan, penulis juga mewawancarai Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Noyan dan didapat informasi bahwa Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan dari PNPM-PPK. Pelestarian kegiatan merupakan tanggung jawab masyarakat.

3. Output PNPM-PPK

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi tentunya akan memberikan keluaran (*output*) sesuatu produk baik berupa barang maupun jasa. Dalam PNPM-PPK, yang diinginkan sebagai *output* adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan. Adapun indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program PNPM-PPK sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (1999: 138) yaitu ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, peningkatan pendapatan, peningkatan kemandirian kelompok, dan meningkatnya kapasitas masyarakat.

a. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Sebagaimana tujuan dilaksanakannya PNPM-PPK yaitu untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Noyan.

Pada Tahun 2006 dari 9.325 jiwa penduduk Kecamatan Noyan terdapat 4.553 jiwa (48,61 %) di katagorikan miskin. Banyaknya penduduk yang dikagorikan miskin ini karena pendapatan perkapita penduduk lebih rendah dari standar upah minimum Kabupaten Sanggau. Pendapatan perkapita penduduk rata-rata hanya Rp. 450.000 saja, sedangkan upah minimum Rp. 900.000. Dengan demikian maka banyak penduduk Kecamatan Noyan di katagorikan miskin.

Melalui PNPM-PPK ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menanggulangnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa informan dan observasi langsung ke lapangan, serta telaahan dokumentasi diperoleh informasi bahwa masih banyak penduduk miskin yang tersebar di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Noyan.

Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Noyan dalam tiga tahun terakhir bila dilihat dari prosentasenya ada kecenderungan menurun. Walaupun penurunannya berpluktuatif. Pada tahun 2006 dari 9.325 jiwa terdapat penduduk miskin sebesar 4.497 jiwa (48,61 %), pada tahun 2007 dari 9.339 jiwa terdapat penduduk miskin sebesar 4.370 jiwa (46,61) bearti terjadi penurunan sebesar 1,82 % bila dibandingkan dengan tahun 2006. Sedangkan untuk tahun 2008 dari 9.663 jiwa terdapat 4.469 jiwa (46,25 %) berarti terjadi penurunan sebesar 0,54 % bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan PNPM-PPK, belum sepenuhnya mampu mengurangi angka kemiskinan. Namun demikian, adanya PNPM-PPK setidaknya dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan. Kecilnya penurunan angka kemiskinan ini disebabkan oleh adanya krisis global yang melanda dunia tidak kecuali masyarakat Kecamatan Noyan.

Masyarakat Kecamatan Noyan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan hasil komoditi utamanya yaitu karet alam dan kelapa sawit. Dengan adanya krisis global harga kedua komoditi tadi menjadi turun. Sebelum krisis global harga karet sebesar Rp. 10.000/kg turun menjadi Rp. 4.000/kg. Sedangkan harga kelapa sawit Rp. 1.800/kg menjadi Rp. 800/kg. Turunnya harga kedua komoditi tersebut tentunya berpengaruh terhadap pendapatan petani.

b. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan.

Pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti jalan dan sarana air bersih serta adanya bantuan dana simpan pinjam membuka peluang bagi masyarakat Kecamatan Noyan dalam berusaha. Sebelum adanya kegiatan PNPM-PPK, mata pencaharian masyarakat Kecamatan Noyan sebagian besar adalah petani. Sedangkan setelah adanya kegiatan PNPM-PPK terjadi perubahan atau perkembangan dalam bidang usaha.

Dari hasil penelitian penulis dengan mewawancarai responden serta pengamatan langsung di lapangan diperoleh informasi bahwa terjadi perkembangan bidang usaha yang digeluti oleh masyarakat di kecamatan Noyan. Seperti usaha perbengkelan, transportasi, peternakan, pertukangan, rias wajah/rias pengantin dan lain-lain. Berkembangnya usaha ini sebagai akibat telah dibangunnya jalan yang menghubungkan antar desa dengan desa serta antara desa dengan kecamatan. Selain itu juga karena adanya pinjaman modal usaha melalui dana simpan pinjam.

c. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Salah satu prinsip PNPM-PPK adalah berorientasi kepada masyarakat miskin. Dalam setiap tahapannya masyarakat selalu dilibatkan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, musyawarah antar desa, pelatihan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaannya serta pengawasan dan pemeliharannya dilakukan oleh masyarakat. Karena pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK melibatkan masyarakat, maka terjadi peningkatan kepedulian terhadap usaha untuk meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

Wujud dari kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin terlihat dari setiap tahapan kegiatan selalu mengikutsertakan wakil masyarakat miskin. Dimana wakil masyarakat miskin juga ikut dalam kegiatan sosialisasi, musyawarah antar desa, pembangunan sarana dan prasarana juga menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu pemberian dana simpan pinjam juga sasarannya kelompok masyarakat miskin.

d. Meningkatkan Kemandirian Kelompok

Pemberian dana bantuan simpan pinjam dalam PNPM-PPK dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat terutama dalam upaya mendapatkan modal usaha. Selain itu pemberian dana simpan pinjam ini juga disertai dengan pembinaan-pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas instansi terkait terhadap kelompok penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai masyarakat diperoleh informasi bahwa pemberian dana bantuan melalui dana simpan pinjam dapat meningkatkan kemandirian kelompok dalam berusaha. Kemandirian ini dapat dilihat dari makin berkembangnya usaha produktif anggota kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya bantuan dana simpan pinjam ini, terjadi perguliran dana pinjaman terhadap kelompok lain.

e. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat

Pelaksanaan PNPM-PPK berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan terutama pendapatan keluarga miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Peningkatan kapasitas masyarakat ini ditandai dengan semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang diperoleh melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan dalam PNPM-PPK. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki setelah mereka mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan melalui PNPM-PPK merupakan modal dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosialnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dan sosialnya berarti kapasitas masyarakat juga akan meningkat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis terhadap masalah-masalah yang dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pelaksanaan PNPM-PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Pertama, PNPM-PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau adalah program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Kedua, pelaksanaan PNPM-PPK di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau lebih diprioritaskan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik saja. Sedangkan pembangunan bidang sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat miskin belum memadai. Ketiga, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan PNPM-PPK sebagai berikut: (a) masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana sehingga kurang optimalnya setiap pelaksanaan program; (b) terbatasnya dana yang di alokasikan dalam mendanai pelaksanaan program pembangunan; (c) masih lemahnya pemahaman terhadap visi dan misi organisasi terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan. Keempat, upaya yang ditempuh guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: (a) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan pembinaan langsung di lapangan dan mengadakan pelatihan pengelolaan kegiatan, pelatihan penyusunan rencana kegiatan, pelatihan Administrasi Keuangan; (b) untuk mengatasi kekurangan dana dilakukan dengan menghimbau masyarakat agar mau berpartisipasi baik berupa uang, barang, dan tenaga; dan (c) menanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa pembangunan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menyusun beberapa rekomendasi. Pertama, meningkatkan pembinaan kecakapan (*Skill training*) yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara intansif dan berkelanjutan atau berkala oleh instansi teknis terkait kepada aparat pengelola kegiatan dan masyarakat. Adapun instansi teknis terkait tersebut seperti Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Kimpraswil. Sehingga dengan adanya pembinaan akan menambah kecakapan atau kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Kedua, mengadakan sosialisasi akan pentingnya pendidikan. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya, Membangun sekolah kejuruan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, Membangun Balai Latihan Kerja, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti

program paket B dan paket C, serta memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi terutama yang berasal dari keluarga miskin. Ketiga, pada tahun-tahun mendatang kegiatan yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti kegiatan kursus keterampilan, kursus kecantikan atau tata rias wajah, kursus perbengkelan otomotif dan pertukangan, kursus pengolahan hasil pertanian. Sehingga dengan modal keterampilan yang dimiliki nantinya akan dapat membuka lapangan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Depdagri, Ditjen PMD. 1997. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM PPK*. Jakarta
- Hardjana, A.M. 1998. *Empowering People (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Keban, Yeremias T, (2004), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Manullang, M, (1992), *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Media.
- Muhadjir, N. 2004. *Metodologi Penelitian dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian. Kebijakan dan Perencanaan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustopadidjaja (1986), *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Mustopadidjaja. 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Dalam *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implikasi*. Jakarta: CSIS.
- Roesmidi dan Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Siagian, S.P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, M. 1998. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3S.
- Sumodiningrat, G., 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia.
- Tjokroamidjojo, B. 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.